

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Organisasi sektor publik yang sering diidentikkan dengan pemerintahan atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya.

Fenomena yang muncul pada organisasi sektor publik di Indonesia menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2018).

Sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 diungkapkan bahwa, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami. Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. Selain itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pekerjaan tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pegawai yang bekerja dalam pengelolaan keuangan harus memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Jika yang terjadi sebaliknya, maka pemanfaatan teknologi justru akan mempersulit pekerjaan pegawai. Selain itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai metode untuk dapat mengawasi dan memberikan keyakinan tercapainya tujuan suatu organisasi menjadi penting, sehingga hal-hal yang telah direncanakan dapat terlaksana.

Selain sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan terutama keterandalan dan ketepatanwaktuan. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Selain wajib untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang memadai juga sangat diperlukan. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari beberapa unsur, diantaranya (PP 60 Tahun 2008): (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian intern. Dalam PP 60 tahun 2008, seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik disebut dengan Pengawasan Intern.

Pengawasan dalam sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (*series of actions and on going basis*). Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (Armando, 2013).

Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, adanya kenaikan opini merupakan adanya perbaikan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Opini tidak memberikan pendapat (TMP), artinya auditor tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa karena dua alasan, yaitu auditor terganggu independensinya dan auditor dibatasi untuk mengakses data tertentu. Opini wajar dengan pengecualian (WDP), bahwa laporan keuangan yang diperiksa sebagian besar pos dalam laporan keuangan, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut telah disajikan secara wajar terbebas dari salah saji material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan untuk pos-pos tertentu disajikan secara tidak wajar. Opini wajartanpa pengecualian (WTP) adalah jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Opini WTP artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Opini WTP dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP) diberikan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain.

Fenomena yang terjadi terkait dengan laporan hasil audit kabupaten lampung tengah dapat dilihat pada tabel berikut yaitu:

Tabel 1.1
Opini BPK atas LKPD Provinsi Lampung

No.	Pemda	2012	2013	2014	2015	2016
1	Provinsi Lampung	WTP	WDP	WTPDP	WTP	WTP
2	Kab. Lampung Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Lampung Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
4	Kab. Lampung Tengah	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP
5	Kab. Lampung Timur	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	Kab. Lampung Utara	TW	TW	WDP	WTP	WTP
7	Kab. Mesuji	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Pesawaran	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
9	Kab. Pesisir Barat	-	-	TMP	TMP	WDP
10	Kab. Pringsewu	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
11	Kab. Tanggamus	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP
12	Kab. Tulang Bawang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. TL Bawang Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Way Kanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kota Bandar Lampung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kota Metro	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: www.bpk.go.id/ihps, 2016

Dilihat dari tabel 1.1 diatas, opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dari tahun anggaran 2012 hingga 2016, sempat memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada tahun 2013, 2014, dan 2015 yang berarti adanya penurunan akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Fenomena diatas diperkuat pula adanya informasi dalam rangka kunjungan kerja Penyusunan Rekomendasi BAP DPD RI Atas Temuan Pemeriksaan BPK RI di Provinsi Lampung Tahun 2019 kali ini, BAP DPD RI melakukan pemantauan hasil pemeriksaan BPK RI atas 7 entitas. Mulai Provinsi Lampung; Kota Bandarlampung; Kabupaten Lampung Timur; Kabupaten Lampung Selatan; Kabupaten Lampung Tengah; Kabupaten Mesuji; dan Kabupaten Pesisir Barat.

Kunjungan kerja ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi sejauh mana rekomendasi BPK RI telah ditindaklanjuti oleh masing-masing entitas atau obyek pemeriksaan. Hal ini guna menjamin bahwa pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara yang merugikan atau dapat merugikan negara telah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya.

Temuan BPK Semester I 2019 untuk kabupaten Lampung Tengah terdapat 1,14 miliar sudah ditindaklanjuti 51%, sisanya masih di proses. Pernyataan Kepala BPK Perwakilan Lampung Ambar Sri Wahyuni, kepada *harianlampung.com*, “Opini Wajar Tanpa Syarat (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah daerah, bukan berarti tak ada temuan penyimpangan keuangan dalam jalannya pemerintahan. Opini Wajar Tanpa Syarat (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah daerah, bukan berarti tak ada temuan penyimpangan keuangan dalam jalannya pemerintahan.” (www.teraslampung.com).

Kebijakan dan sistem akuntansi belum seluruhnya diimplementasikan, pemuktahiran database SDM belum optimal juga tidak melaksanakan analisis kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk setiap hari dan fungsi. Ambar juga menyebutkan SDM pengelola keuangan aset dan Teknologi Informasi belum semua memiliki kompetensi, bahkan optimalisasi pengelola keuangan, aset TI belum memadai.

Beberapa penelitian berkenaan dengan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain; Penelitian Nurillah (2014) menyatakan kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Fikri (2016) menyatakan bahwa, secara simultan dan parsial kompetensi sumber

daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian hasil penelitian Hasmin *et.all* (2017) menyatakan bahwa; 1) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan 2) Kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan 3) Sarana prasarana berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan dan 4) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumberdaya manusia dan sarana prasarana berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya hasil penelitian Pratama (2017) menyatakan bahwa; 1) Kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, 2) Penerapan sistem akuntansi keuangan Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, 3) Peran audit internal menurut persepsi dari aparatur/SDM yang bekerja di lingkungan Pemda ketika mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 4) Penerapan sistem akuntansi keuangan Daerah dan peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan dimoderasi sistem pengendalian internal Pemerintah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan dimoderasi sistem pengendalian internal Pemerintah.

Sedangkan hasil penelitian Darmawan *et.all* (2018) menyatakan bahwa; 1) Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 2) Pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPA Provinsi Aceh. 3) Kompetensi Sumberdaya berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPA Provinsi Aceh. 4) Penerapan

sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPA Provinsi Aceh.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Darmawan(2018). yang menjadikan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang sebagai objek penelitian, Darmawan (2018) menyatakan bahwa baik secara parsial maupun simultan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Malang. Kemudian berdasarkan penelitian Andika (2017) penulis menambahkan variable peran audit internal sebagai salah satu variable independen yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian, yaitu pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah pegawai pada SKPA Provinsi Aceh, sedangkan pada penelitian ini penulis menjadikan OPD Kabupaten Lampung Tengah sebagai objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Audit Internal dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD di Kabupaten Lampung Tengah)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah?

2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah?
4. Apakah pemanfaatan peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah?
5. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, peran audit internal, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

3. Membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
4. Membuktikan secara empiris pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
5. Membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.5. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis / bagi pemerintah
Sebagai sumbangan pemikiran agar dapat digunakan atau diambil manfaatnya dan dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi Peneliti
Sebagai bahan pertimbangan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan pengembangan mengenai akuntansi keprilakuan dan akuntansi sektor publik.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini sistematika penulisan diuraikan dalam 5 bab secara terpisah, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi sumber data, metode pengumpulan data, seperti menjelaskan populasi dan sampel penelitian, fokus penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memdemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya pikir peneliti dalam menganalisis persoalan yang dibahas, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori Agensi dalam Pemerintahan

Teori keagenan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak (*agent*) setuju untuk bertindak dengan persetujuan pihak yang lain (*principal*). Syafitri (2012:10), mengatakan bahwa *agencyproblem* muncul ketika prinsipal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Menurut Syafitri (2012:10), hubungan keagenan ini menyebabkan dua permasalahan, yaitu adanya informasi asimetris dimana agen secara umum memiliki lebih banyak informasi dari prinsipal dan terjadi konflik kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan, dimana agen tidak selalu bertindak sesuai dengan tujuan kepentingan prinsipal. Dengan demikian, *agency problem* muncul karena agen muncul karena agen mempunyai informasi yang lebih baik, berkesempatan untuk mengambil keputusan atau bertindak sesuai dengan kepentingannya tanpa menghiraukan kepentingan *principal*.

Syafitri (2012:10) menyatakan bahwa *agency problem* terjadi pada semua organisasi. Pada perusahaan *agency problem* terjadi antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Pada sektor pemerintahan *agency problem* terjadi antara pejabat yang terpilih rakyat sebagai *agent* dan para pemilih (masyarakat) sebagai *principal*. Pejabat pada pemerintahan sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik, memiliki lebih banyak informasi

sehingga dapat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat sebagai principal seperti menggunakan kepentingan pribadi, termasuk korupsi (Darmastuti, 2011).

Halim et. all (2006) juga menyatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik Masalah keagenan yang terjadi pada pemerintahan, yaitu antara eksekutif dan legislatif dan antara legislatif dengan publik. Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif sebagai *agent* dan legislatif sebagai *principal*. Dalam hal ini, legislator ingin dipilih kembali, dan agar terpilih kembali, legislator mencari program dan *project* yang membuatnya populer di mata konstituen.

Dalam hubungan keagenan antara legislatif sebagai agen publik sebagai principal, Von Hagen dikutip Halim et. all (2006) berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (*voters*) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana *voters* memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika pejabat kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka diharapkan dapat mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya. Pada Kenyataannya pejabat sebagai agen selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas

jika dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan yaitu :

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*prediktive value*), yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu (*timeliness*), yaitu informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a. Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbedanya jauh.

- c. Netralitas, yaitu informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- 3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- 4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.3.1 Pengertian Kompetensi

Sumber daya manusia adalah aset organisasi yang paling berharga, begitulah pernyataan dari para pimpinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam organisasi itu, perkiraan kas, aktiva tetap aktiva berwujud dan tidak berwujud nonmanusia lainnya itu sebenarnya dikendalikan oleh manusia. Manusia adalah yang mengelola suatu perusahaan, manusia adalah yang menciptakan nilai tambah, dan tanpa sumber

daya manusia, perusahaan tidak akan bisa menghasilkan laba sebagai nilai tambah bagi organisasi itu sendiri.

Kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Nurillah, 2014). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga (Nurillah, 2014).

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan kumpulan sumber daya manusia (SDM) beserta modal yang memiliki tugas dalam menyiapkan informasi keuangan dan informasi non keuangan (Antasari, 2015). Berdasarkan dengan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia berperan penting dalam terwujudnya keefektivitasan sistem informasi akuntansi.

Menurut Spencer dan Spencer yang dikutip oleh Sutrisno(2009:221) mengatakan bahwa:Kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yangdihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pasal 3, menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki pegawai negeri sipil (PNS), berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Penilaian terhadap pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif, berdasarkan kinerja para karyawan yang ada di dalam organisasi, dengan bukti penguasaan mereka terhadap

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap sebagai hasil belajar (Sutrisno, 2009:223).

Berdasarkan kutipan di atas, menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia organisasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan yang dibebankan oleh organisasi. Kompetensi yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud hasil pelaksanaan tugas yang mengacu pada pengalaman langsung.

2.3.2 Komponen Pembentuk Kompetensi

Hutapea dan Thoha (2008:28) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*), informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu), misalnya bahasa komputer.
2. Kemampuan (*skill*), sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan. Misalnya standar perilaku para karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.
3. Perilaku individu (*attitude*), perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji.

Konsep dasar kompetensi berawal dari konsep individu yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan mengembangkan kemampuan individu agar dapat bekerja dengan prestasi yang luar biasa. Individu merupakan komponen utama yang menjadi pelaku dalam organisasi. Oleh karena itu, kemampuan organisasi tergantung dari kemampuan individu-individu yang bekerja dalam organisasi.

2.4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sebagai upaya dalam melaksanakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah (Lily, 2015).

Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Baik buruknya laporan keuangan salah satunya dapat dilihat melalui sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. Selain itu, sistem akuntansi keuangan daerah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Lily, 2015)

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan (Superdi, 2017). Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut pasal 232 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas

transaksi serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggung-jawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Berikut indikator sistem akuntansi keuangan daerah oleh Superdi (2017) antara lain:

1. Basis Akuntansi.
2. Unsur-Unsur Laporan Realisasi Anggaran.
3. Penyusunan APBD.
4. Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan PP 71 Tahun 2004.

2.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi merupakan mesin untuk menjalankan sistem informasi. Teknologi menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Dalam sistem informasi berbasis komputer, teknologi terdiri dari tiga komponen yaitu komputer, penyimpanan data diluar (*auxiliary storage*), telekomunikasi, dan perangkat lunak (*software*) (Mulyadi, 2010).

Definisi teknologi informasi menurut Darwanis & Mahyani (2009) dalam penelitiannya adalah teknologi yang mempunyai kemampuan sedemikian rupa untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*), menampilkan (*represent*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi. Pengembangan sistem informasi yang sesuai memerlukan perpaduan dari berbagai pengetahuan tentang sistem komputer, sistem informasi dan pengetahuan tentang bagaimana merancang dan menerapkan sebuah sistem informasi serta bagaimana memperoleh sistem komputer yang diperlukan.

Menurut Indriasari & Nahartyo (2008), teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran

informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Memfaatkan kemajuan teknologi tidak hanya dalam teknologi komputer. Jaringan internet juga dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta pelayanan kepada masyarakat umum, salah satunya dengan kemudahan untuk mengakses profil pemerintah daerah melalui situs resmi pemerintah daerah terkait. Dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa situs adalah sebuah cara untuk menampilkan profil pemerintah daerah di internet dengan tujuan antara lain menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat. Selain akses profil pemerintah daerah yang terkait, dalam situs resmi tersebut masyarakat dapat mengakses mengenai informasi keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga telah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 bahwa, penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diinformasikan melalui situs resmi pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi berarti memanfaatkan teknologi dalam pengolahan data untuk mempermudah kerja pegawai. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Winidyaningrum & Rahmawati, 2010).

Pemanfaatan teknologi informasi termasuk didalamnya pengolahan data, pengolahan informasi, serta proses kerja secara elektronik dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan adanya kemudahan dan kemurahan untuk mengakses informasi keuangan. Selain itu, pengolahan data dengan bantuan komputer jelas akan mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan. Sebagai contoh penerapan pemanfaatan teknologi didalam sektor publik selain memberikan kemudahan dalam mengakses data keuangan antara lain, membantu proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Banyak kemudahan yang didapat jika menggunakan komputer, contoh sederhananya adalah hasil output pengolahan data lebih rapi jika dilakukan secara otomatis. Selain itu, proses pengolahan data dan transaksi ekonomi akan lebih cepat, dapat mempersingkat waktu. Sedangkan kelemahannya menurut Yosefrinaldi (2013), sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian *hardware* yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak.

2.6 Peran Audit Internal

Peran Audit Internal Sesuai UU No. 15 Tahun 2004, pengawasan internal ialah semua proses kegiatan audit yang mulai review, evaluasi dan penilaian, pemantauan, dan 17 kegiatan pengawasan lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang positif bahwa kegiatan telah diselenggarakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Penelitian ini cenderung pada persepsi dari aparatur/SDM yang bekerja di lingkungan Pemda. Peran audit internal dianggap baik menurut pandangan dari aparatur/SDM yang menyusun laporan keuangan

ketika dalam penugasannya auditor internal yang disebut Inspektorat bekerja secara profesional dan objektif dalam melakukan penilaian keandalan informasi keuangan, penilaian ketaatan maupun kinerja, serta penilaian efisiensi dan efektifitas program yang telah direncanakan oleh pihak yang diaudit

2.7 Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi (Arfianti, 2011).

2.7.1 Pengertian Pengendalian Intern

Menurut *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* sebagaimana dikutip oleh Susanto (2008:95), pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh direksi organisasi, manajemen, dan personel lainnya, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai akan tercapainya tujuan dalam kategori berikut: (a) Efektivitas dan efisiensi operasi; (b) Keandalan pelaporan keuangan; (c) Ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern merupakan bagian integral dari proses manajemen karena konsep dasar dari pengendalian intern meliputi (1) berbagai kegiatan (*a process*), (2) dipengaruhi oleh manusia (*is affected by people*), dan (3) diharapkan dapat mencapai tujuan (*objectives*).

Pengendalian internal yang berkualitas adalah pengendalian yang efektif dan mengacu pada pencapaian dan sasaran organisasi atas pengendalian yang dirancang. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu pengendalian internal dikatakan efektif apabila memahami tingkat sejauh mana tujuan operasi entitas tercapai, laporan keuangan yang diterbitkan dipersiapkan secara handal, hukum dan regulasi yang berlaku dipatuhi. Suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi: Direksi dan manajemen mendapat pemahaman akan arah pencapaian tujuan perusahaan, dengan, meliputi pencapaian tujuan atau target perusahaan, termasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas, dan keamanan sumber daya (*asset*) perusahaan. Laporan Keuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat dipercaya, yang meliputi laporan segmen maupun interim. Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah taati dan dipatuhi dengan semestinya (Dewi et.al, 2012:161).

Selain manajemen perusahaan, pengendalian intern juga diperlukan oleh auditor independen yang ditugaskan untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan serta kegiatan operasi perusahaan. Arti pentingnya sistem pengendalian intern bagi manajemen dan auditor sudah lama diakui oleh profesi akuntansi dan pengakuan tersebut semakin meluas dengan alasan (Boyntn, 2003:371):

1. Lingkup dan ukuran bisnis entitas telah menjadi sangat kompleks dan tersebar luas sehingga manajemen harus bergantung pada sejumlah laporan dan analisis untuk mengendalikan operasi secara efektif;
2. Pengujian dan penelaahan yang melekat dalam sistem pengendalian internal yang baik menyediakan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidak beresan;
3. Tidak praktis bagi auditor untuk melakukan audit atas kebanyakan perusahaan dengan pembatasan biaya ekonomi tanpa menguntungkan pada sistem pengendalian internal.

Internal control merupakan serangkaian tindakan, kebijakan metode dan prosedur sebagai suatu proses yang melibatkan orang dalam melaksanakan keseluruhan operasi organisasi. *Internal control* ada dalam proses manajemen, baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang melibatkan dewan komisaris, manajemen dan personal lainnya untuk mencapai: 1) tujuan operasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif; 2) penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan yang dapat dipercaya; dan 3) mendorong kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Makhdalena, 2009:62).

Menurut Hartadi dalam Kristanto (2009:45), sistem pengendalian internal yang kuat, yaitu melalui kebijakan akuntansi yang sehat, penyelenggaraan sistem perkiraan yang cukup lengkap dan efektif, adanya perlindungan aktiva perusahaan dan berfungsinya staff pemeriksaan internal. Pengendalian intern yang dipahami sebagai usaha manajemen dalam menjaga aktiva (kekayaan) organisasi melalui penerapan prosedur tertentu bekerja melalui tiga dimensi dalam menjaga aktiva perusahaan. Pengendalian intern yang baik dan disertai praktek-praktek yang sehat dalam tata kelola keuangan akan menjaga kekayaan perusahaan secara *preventif, detektif* dan *korektif* (Wiratmaja, 2010:79).

Menurut Agoes (2004:79), pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting bagi proses pemeriksaan oleh akuntan publik, auditor harus mendokumentasikan pemahamannya tentang komponen pengendalian intern entitas yang diperoleh untuk merencanakan audit, karena baik buruknya pengendalian intern akan memberikan pengaruh yang besar terhadap:

1. Keamanan harta perusahaan
2. Dapat dipercayai atau tidaknya laporan keuangan perusahaan
3. Lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntansi
4. Tinggi rendahnya *audit fee*
5. Jenis opini yang akan diberikan akuntan public

2.7.2 Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian intern harus memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi telah mendapatkan otorisasi dan dilaksanakan dengan benar sesuai dengan kebijakan perusahaan, serta pencatatan transaksi tersebut dengan benar. Di bawah ini terdapat 5 tujuan pengendalian intern atas transaksi, yaitu (Suharli, 2006:55):

1. Otoritas (wewenang), Setiap transaksi harus mendapat otorisasi semestinya berdasarkan struktur dan kebijakan perusahaan. Dalam keadaan atau masalah-masalah tertentu sangat perlu ditentukan otorisasi khusus.
2. Pencatatan, Pencatatan atas transaksi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan pada waktu yang tepat dengan uraian yang wajar. Transaksi yang dicatat adalah transaksi yang benar-benar terjadi dan lengkap.
3. Perlindungan, Harta fisik berwujud tidak boleh berada dibawah pengawasan atau penjagaan dari mereka yang bertanggungjawab. Dalam hal ini pengendalian intern memperkecil resiko terjadinya kecurangan oleh karyawan atau manajemen sekalipun.
4. Rekonsiliasi, secara *continue* dan periodik antara pencatatan dengan harta fisik harus dilakukan misalnya mencocokkan jumlah persediaan barang antara kartu persediaan dengan persediaan fisik di gudang.
5. Penilaian, Harus dibuat ketentuan agar memberikan kepastian bahwa seluruh harta perusahaan dicatat berdasarkan nilai yang wajar. Tidak boleh terjadi *over* ataupun *under valved* atas harta tersebut.

2.7.3Komponen-Komponen Pengendalian Internal

Menurut Utomo (2006:72), komponem-komponen dari pengendalian Internal mencakup:

1. Lingkungan Lingkungan pengendalian (*Control Environment*), Komponen ini memperlihatkan bahwa hal yang terkandung pada kontrol terutama pada sistem akuntansi dan prosedur harus dijalankan.
2. Penetapan risiko, (*Risk Assesment*), komponen ini mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang dihadapi perusahaan dan bagaimana cara mengelola resiko tersebut.

3. Aktivitas pengendalian, memastikan bahwa setiap transaksi telah diotorisasi oleh yang berwenang, telah ada pemisahan fungsi, dokumentasi dan pencatatan yang memadai, harta dan catatan telah diamankan, dan pengecekan oleh pihak independent telah dilakukan serta penilaian terhadap pencatatan telah dilaksanakan.
4. Pemrosesan Informasi dan Komunikasi (*Information Processing and Communication*), pada komponen ini informasi diidentifikasi, diambil dan diubah sepanjang waktu dan menyediakan formulir untuk memperbolehkan karyawan mengubah tanggung jawabnya.
5. Pemantauan (Monitoring), pada komponen ini berfungsi untuk memastikan bahwa pengendalian internal telah berjalan dengan baik Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi yaitu: keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan berlaku.

2.8. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Nurillah, As Syifa (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,	Kualitas laporan keuangan, kompetensi SDM, sistem akuntansi keuangan, teknologi informasi, sistem pengendalian intern	Kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah

		Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada SKPD kota Depok)		mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2.	Fikri, Dzulfikar Ahli(2016)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Secara parsial dan simultan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Malang.

		Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang)		
3	Hasmin <i>et.all</i> (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komptensi Sumberdaya Manusia, Sarana Prasarana, Kualitas Laporan Keuangan	Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumberdaya manusia dan sarana prasarana baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng
4	Pratama, Andika(2017)	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan	Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan	Kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan peran

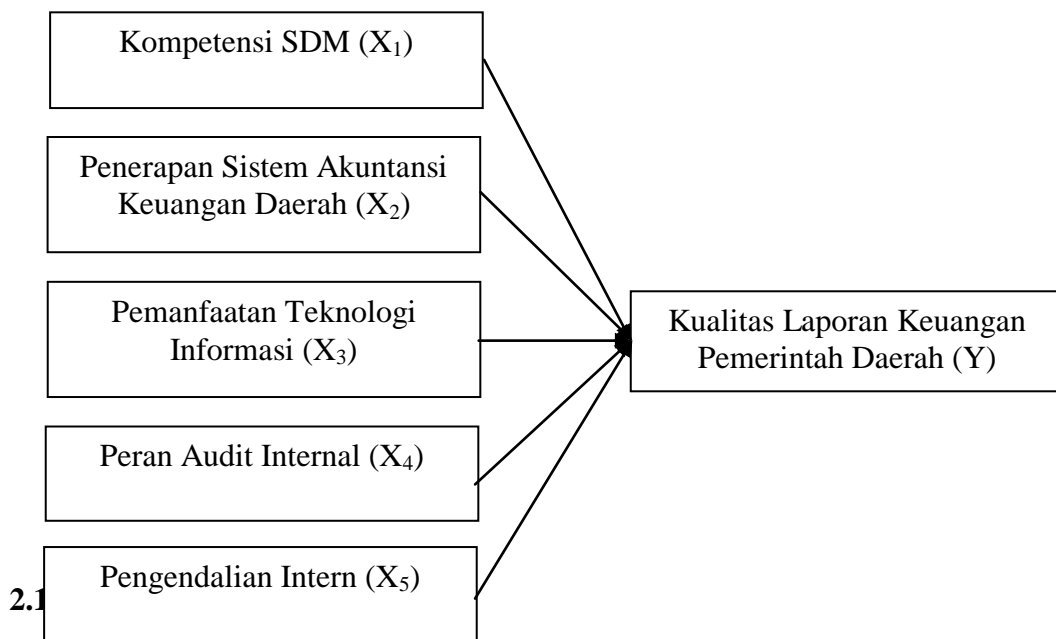
		Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas LKPD Dengan Variabel Moderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Daerah, Dan Peran Audit Internal, Kualitas LKPD, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Ketika sistem pengendalian internal pemerintah menjadi moderasi kompetensi SDM tidak signifikan terhadap kualitas LKPD.
5	Darmawan <i>et.all</i> (2018)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan	Sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan,

		SKPA Provinsi Aceh		
--	--	-----------------------	--	--

2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian



2.10.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005 dalam Nurillah, 2014). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga (Nurillah, 2014). Selanjutnya berdasarkan

hasil penelitian Nurillah (2014), Fikri (2016), Hasmin *et.all* (2017),Pratama (2017), dan Darmawan *et.all* (2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah.

2.10.2 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut pasal 232 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggung-jawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Nurillah (2014), Fikri (2016), Hasmin *et.all* (2017),Pratama (2017), dan Darmawan *et.all* (2018) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H₂ : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah.

2.10.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi berarti memanfaatkan teknologi dalam pengolahan data untuk mempermudah kerja pegawai. Menurut Hamzah (2009) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Winidyaningrum & Rahmawati, 2010). Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Nurillah (2014), dan Darmawan et.all (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H₃ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah.

2.10.4 Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peran audit internal dianggap baik menurut pandangan dari aparatur/SDM yang menyusun laporan keuangan ketika dalam penugasannya auditor internal yang disebut Inspektorat bekerja secara profesional dan objektif dalam melakukan penilaian keandalan informasi keuangan, penilaian ketaatan maupun kinerja, serta penilaian efisiensi dan efektifitas program yang telah direncanakan oleh pihak yang diaudit (Andika, 2017). Hasil penelitian Andika (2017) menyatakan peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H₄ : Peran Audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah.

2.10.5 Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Hartadi dikutip Kristanto (2009:45), sistem pengendalian internal yang kuat, yaitu melalui kebijakan akuntansi yang sehat, penyelenggaraan sistem perkiraan yang cukup lengkap dan efektif, adanya perlindungan aktiva perusahaan dan berfungsinya staff pemeriksaan internal. Sudarsono (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian Nurillah (2014), Fikri (2016), dan Darmawan et.al (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H₅ : Penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode survey. Penelitian akan menggunakan sampel sebagai fokus penelitian untuk membuktikan hipotesis, karena itu pokok kegiatannya adalah mengambil sampel dari populasi pegawai pada OPD di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

3.2 Sumber Data

Data yang dihasilkan oleh peneliti merupakan hasil akhir dari proses pengolahan selama berlangsungnya penelitian. Sumber data menurut cara memperolehnya, antara lain:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. (Sujarweni 2015:39). Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jenis data yang digunakan adalah data dari hasil jawaban kuesioner yang dibagikan kepada Pegawai Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Audit Internal, Pengendalian Interndan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, artikel, buku – buku sebagai teori dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. (Sujarweni 2015:39).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan dalam pengumpulan data menurut Sugiyono (2014:107) melalui wawancara, angket dan observasi:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya, yaitu wawancara dan kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tau apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data, pengumpulan data berdasarkan komunikasi langsung antara peneliti dengan responden yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert (1,2,3,4,5). Dalam skala likert, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner pilihan dimana setiap item pernyataan disediakan 5 jawaban. Dalam penentuan skor nilai, penelitian ini menggunakan skala Likert. Menurut Sugiyono (2014:107), Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai negatif yang dapat berupa kata-kata antara lain:

- | | | | | |
|----|----|---|---------------|--------|
| 1. | SS | = | Sangat Setuju | Skor 5 |
| 2. | S | = | Setuju | Skor 4 |

- | | | |
|----|---------------------------|--------|
| 3. | RR = Ragu-ragu | Skor 3 |
| 4. | TS = Tidak Setuju | Skor 2 |
| 5. | STS = Sangat Tidak Setuju | Skor 1 |

3. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau keyakinan *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi pada dasarnya merupakan wilayah yang akan dikenai generalisasi dari suatu hasil penelitian. Populasi merupakan totalitas dari suatu karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sudarmanto, 2013).

Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi pada OPD Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini dilakukan pada OPD karena kegiatan dinas atau badan berhubungan secara langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini daftar adalah OPD Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.1

**26 Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah OPD
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah**

No	Nama OPD
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9	Dinas Bina Marga
10	Dinas Ketahanan Pangan
11	Dinas Koperasi dan UKM
12	Dinas Pariwisata
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Dinas Pemuda dan Olahraga
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Dinas Perhubungan
19	Dinas Perikanan
20	Dinas Perindustrian
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24	Dinas Peternakan dan Perkebunan
25	Dinas Sosial
26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber : Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2019

3.4.2 Sampel

Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel merupakan bagian dari suatu populasi yang diambil dengan cara tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh peneliti (Sudarmanto, 2013).

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Semua pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas di OPD Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, diantaranya kabag. keuangan dan staf keuangan.
2. Kuisioner yang dikembalikan dengan pengisian yang lengkap.

3.5 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:88) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan dua variabel yang akan diteliti:

1. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel independen atau variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terkait). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3), Peran Audit Internal (X_4) dan Pengendalian Intern (X_5).

2. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam hal ini yang mejadi variabel terikat adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

3.6 Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel bertujuan untuk menjelaskan makna variabel yang sedang diteliti. Menurut Sujarweni (2015:76) memberikan pengertian tentang definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variable

Variabel	Operasional Variabel	Indikator
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (<i>skill</i>), pengetahuan (<i>knowledge</i>), dan kemampuan (<i>ability</i>) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005 dalam Nurillah, 2014)	1. Pengetahuan 2. Kemampuan 3. Perilaku individu Hutapea et.al (2008)
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₂)	Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut pasal 232 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi serta	1. Basis Akuntansi. 2. Unsur-Unsur Laporan Realisasi Anggaran. 3. Penyusunan APBD. 4. Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan PP 71 Tahun 2004. Superdi (2017)

	<p>pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.</p>	
<p>Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₃)</p>	<p>Menurut Indriasari & Nahartyo (2008), teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan data dan informasi 2. Pemanfaat teknologi untuk pelayanan dan akses <p>Hamzah (2009)</p>
<p>Peran Audit Internal (X₄)</p>	<p>Peran Audit Internal Sesuai UU No. 15 Tahun 2004, pengawasan internal ialah semua proses kegiatan audit yang mulai review, evaluasi dan penilaian, pemantauan, dan 17 kegiatan pengawasan lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang positif bahwa kegiatan telah diselenggarakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian keandalan informal keuangan 2. Penilaian ketaatan 3. Penilaian kinerja 4. Penilaian efisiensi dan efektivitas program 5. Tingkat obyektifitas auditor internal

	mewujudkan tata pemerintahan yang baik.	
Pengendalian Intern (X ₅)	Susanto (2008:95), pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh direksi organisasi, manajemen, dan personel lainnya, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai akan tercapainya tujuan dalam kategori berikut: (a) Efektivitas dan efisiensi operasi; (b) Keandalan pelaporan keuangan; (c) Ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku	1. Lingkungan pengendalian, 2. Penafsiran resiko, 3. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi, 4. Aktifitas pengendalian, 5. Pemantauan. Amelia et.al (2014:6)
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(Y)	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami PP.No.71 Tahun 2010 (Sesuai replikasi dan penelitian terdahulu)

3.7 Uji Persyaratan Instrumen

3.7.1 Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pada program SPSS teknik pengujian yang sering digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk

Momen Pearson). Analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan apa yang ingin diungkap. Koefisien korelasi item-item total dengan *Bivariate Pearson* dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{ix} = \frac{n \sum ix - (\sum i)(\sum x)}{\sqrt{[n \sum i^2 - (\sum i)^2][n \sum x^2 - (\sum x)^2]}}$$

Keterangan:

r_x = Koefisien korelasi item-total (*Bivariate Pearson*)

i = Skor item

x = Skor total

n = Banyaknya subjek

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- Jika r hitung $\geq r$ tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- Jika r hitung $< r$ tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid) Priyatno (2010: 91)

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dalam SPSS uji yang sering digunakan adalah dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Rumus yang digunakan adalah:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

Keterangan:

r_{11} = Reliabilitas instrument

k = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varian butir

σ^2 = Varian total

Untuk pengujian biasanya menggunakan batasan tertentu seperti 0,6 kurang baik, 0,7 dapat diterima, dan diatas 0,8 adalah baik (reliabel). Priyatno (2010: 98).

3.8. Uji Hipotesis

3.8.1 Uji Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2014:243) Regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen (kriterium) bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi dinaik turunkan nilainya. Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila variabel independennya minimal 2. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia(X_1), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2), Pemanfaatan Teknologi Informasi(X_3), Peran Audit Internal (X_4)Sistem Pengendalian Intern (X_5)terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Selain itu juga analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang modelnya sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e$$

Dimana :

b = Koefisien regresi model

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

X_1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X_2 = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X_3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

- X_4 = Peran Audit Internal
 X_5 = Sistem Pengendalian Intern
 e = Error

3.8.2 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Rumus t hitung pada analisis regresi adalah:

$$t \text{ hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Keterangan:

b_i = Koefisien variable i

S_{b_i} = Standar error variable i

Kriteria pengujian adalah, jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, demikian sebaliknya.

3.8.3 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terkait (Ghozali, 2011). Untuk menguji kelayakan model penelitian digunakan uji Anova (Uji F) dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\text{Sig.} \leq 5\%$), maka model penelitian dapat digunakan atau model penelitian tersebut sudah layak.
2. Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($\text{Sig.} > 5\%$), maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model penelitian tersebut tidak layak